

**PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERUSAHAAN DITENGAH PANDEMI COVID-19
PADA PT GEOSERVICES**

**Oleh : Bambang Ermansyah Saragih, Andarias Sambo,
Shinta Purnamayani, Gada Sembada**

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI

Email : bambang.ermansyahsaragih@stimaimmi.ac.id

Abstrak

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Transparansi terhadap Implementasi Kebijakan Perusahaan ditengah Pandemi Covid-19.

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Nonprobability Sampling. Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang dan kesempatan sama bagi setiap populasi. Dengan yang dijadikan sampel 25% atau 42 orang dari populasi yang ada 168 orang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Transparansi terhadap Implementasi Kebijakan Perusahaan ditengah Pandemi Covid-19 berdasarkan hasil analisa regresi linier sederhana menunjukkan bahwa t hitung = 5,008 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh positif antara variabel Transparansi (X) terhadap variabel Implementasi Kebijakan Perusahaan (Y).

Kata Kunci : Transparansi dan Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

PT. Geoservices telah memperoleh dasar keahlian yang kuat yang mencakup semua aspek eksplorasi dan pengembangan minyak, gas, mineral dan industri panas bumi. PT. Geoservices dikenal secara internasional karena keahlian dan keandalannya dalam semua bidang

kegiatannya. Pertumbuhan ukuran dan reputasi perusahaan berakar pada keunggulan karyawannya. Dasar untuk keunggulan ini adalah komitmen jangka panjang untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan, termasuk pelatihan lepas pantai untuk karyawan lokal dan interaksi dengan konsultan ekspatriat yang pindah ke Indonesia untuk periode waktu yang bervariasi. Untuk memudahkan alih teknologi PT. Geoservices masuk ke dalam Perjanjian Joint Venture atau Bantuan Teknis dengan yang berbasis di luar negeri perusahaan yang diakui sebagai pemimpin di bidangnya masing-masing. Kombinasi personel yang berpengalaman, instrumentasi modern, pelatihan staf ekstensif dan prosedur kontrol kualitas yang ketat telah diperoleh PT. Geoservices di seluruh dunia. Dedikasi untuk menjaga standar tinggi di Indonesia ini memastikan bahwa layanan perusahaan akan menikmati pengakuan internasional selama bertahun-tahun yang akan datang.

PT. Geoservices memiliki filosofi “Layanan Prima dengan Profesional Tinggi Integritas”. Perusahaan telah mendapatkan reputasi tinggi di antara mayor perusahaan pertambangan di Indonesia, serta perusahaan luar negeri yang membeli batubara Indonesia.

Meski sejak Januari 2020 belahan dunia sudah panik dengan Covid-19, Indonesia baru mengumumkan kasus pertamanya pada 2 Maret 2020 . Presiden Joko Widodo sendiri yang langsung mengumumkan dari istana Negara. Setelah pengumuman itu, hari-hari bangsa ini diisi oleh informasi penambahan pasien positif dan penyebarannya yang begitu cepat di seluruh provinsi di tanah air.

Pandemi virus COVID-19 tidak hanya mengancam sektor kesehatan, namun juga mengancam krisis ekonomi global. Berdasarkan data dari World Economic Outlook April 2020, IMF memprediksikan perekonomian dunia akan merosot hingga ke minus tiga persen sampai dengan tahun ini. Namun bila pandemi ini berakhir pada paruh kedua tahun 2020 dan aktivitas ekonomi kembali normal, maka ekonomi Indonesia diprediksi bisa tumbuh hingga 8,2 persen, sementara perekonomian dunia akan tumbuh hingga 5,8 persen. Untuk dampak yang dirasakan bagi sektor bisnis dan industri ini adalah sebagian dari pertumbuhan mengalami minus dan sebagian mengalami pertumbuhan secara positif sehingga bisa dikatakan bahwa dampak yang dirasakan oleh sektor bisnis dan industri ini tidak semuanya mengalami minus atau merugi. (Kantar Worldpanel Indonesia, 2020)

Efek pertama dari pandemi ini adalah beralihnya sistem finansial perusahaan ke zero-based budgeting. Kedua adalah adanya Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK) besar-besaran di

berbagai perusahaan. Efek ketiga adalah kekacauan produksi yang dialami berbagai perusahaan. Efek keempat adalah penurunan produktivitas perusahaan. Dampak terakhir adalah runtuhnya perusahaan akibat kebangkrutan yang disebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan di tengah pandemi. Secara keseluruhan, pandemi ini membawa dampak yang sangat besar terutama di sektor bisnis. Dampak besar tersebut tentunya bersifat negatif. Banyak perusahaan mengalami kerugian besar. Mereka melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Dampak utama yang harus dihadapi perusahaan adalah beralihnya sistem finansial perusahaan menjadi zero based budgeting agar perusahaan dapat mencapai titik impas, PHK perusahaan besar, kekacauan produksi perusahaan, penurunan produktivitas perusahaan dan dampak terakhir adalah runtuhnya perusahaan. Berbagai dampak negatif menunjukkan perjuangan yang dilakukan sektor bisnis untuk dapat bertahan selama pandemi Covid-19.

Menyikapi wabah virus Corona atau Covid-19, seluruh lapisan masyarakat saling bekerja sama dalam penanganan Covid-19 dari tingkat pemerintah pusat hingga yang paling bawah ada di lingkup keluarga. Wabah Covid-19 yang lebih viral disebut dengan Wabah Corona membuat dampak sistemik di masyarakat. Sektor pekerjaan baik formal maupun informal seperti pendidikan, pariwisata, perdagangan dan transportasi harus bekerja keras beradaptasi terhadap perkembangan infeksi Covid-19. Berbagai cara pun dilakukan mulai dari dibuatnya kebijakan-kebijakan yang menyangkut mengumpulkan atau berkegiatan dengan orang yang banyak, misalnya penerapan “social distancing” dengan membatasi kunjungan ketempat ramai dan melakukan kontak langsung dengan orang lain. Salah satu metode yang digunakan untuk menerapkan social distancing tersebut adalah dengan bekerja dari rumah atau “Work Form Home” (WFH). Kebijakan ini disambut dengan berbagai reaksi, ada yang menyambut dengan positif dan ada juga yang meragukan apakah WFH bisa diterapkan secara efektif, mengingat penerapannya yang tiba-tiba dan kemungkinan kurang siapnya masyarakat akan kebijakan ini dan juga kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab apa Pengaruh Implementasi dan Transparansi Kebijakan Perusahaan Ditengah Pandemi Covid-19 untuk dapat mempertahankan bisnis mereka di tengah Pandemi Covid-19 yang melanda Dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan apa saja kebijakan-kebijakan perusahaan yang harus dilakukan oleh PT. Geoservices sehingga mereka mampu bertahan terhadap perubahan iklim bisnis terutama saat terjadi Covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi

Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Menurut Ritonga dan Syahrir (2016) transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi

merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Kebijakan Perusahaan Ditengah Pandemi Covid-19

Agar perusahaan memperoleh pemahaman secara menyeluruh dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap hubungan kerja dengan pekerjanya saat masa pandemi.

Saat ini dunia sedang menghadapi wabah bernama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO). Berawal dari China hingga kemudian mulai tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 tentunya menjadi hambatan besar bagi perkembangan perekonomian negara. Para pelaku usaha atau perusahaan merasa terancam oleh eksistensi Covid-19 karena dapat berimbas langsung pada ruang gerak perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Melihat situasi seperti ini, perusahaan harus mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana karena setiap keputusan yang diambil akan menyangkut kelangsungan hidup para pekerjanya. Diperlukan pemahaman-pemahaman khususnya dari aspek hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha ditengah situasi pandemi seperti ini agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, terutama yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Sebagaimana diketahui, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran yang lebih luas. Salah satunya dengan mensosialisasikan kebijakan social distancing, dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, dengan berlakunya kebijakan tersebut membuat perusahaan semakin sulit untuk bergerak, karena adanya pembatasan-pembatasan, seperti menerapkan konsep Work From Home (WFH) buat para pekerjanya.

Beberapa perusahaan melihat pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan force majeure untuk mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan hubungan kerja. Namun, timbul pro dan kontra terhadap hal itu, terutama dari pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. Karena hubungan antara perusahaan dan pekerja diikat oleh sebuah kontrak.

Oleh karenanya, menetapkan status force majeure dalam perusahaan tentunya harus melalui penilaian yang tepat, apakah perusahaan tersebut benar-benar terdampak atau tidak, agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari. Maka itu, diskusi kali ini tepat bagi Anda perwakilan perusahaan untuk mengetahui seluk beluk hukum hubungan kerja antar pelaku usaha dan pekerja di tengah pandemi dan tepat mengambil kebijakan ketenagakerjaan.

Hal tersebut menjadi pilihan yang sangat sulit untuk dijalankan perusahaan karena tidak semua perusahaan dapat efektif menjalankan usahanya hanya dengan melakukan WFH. Akibatnya terdapat Kebijakan yang dikeluarkan PT Geoservices terkait Pandemi lebih ke penanganan / pencegahan penyebaran virus ini seperti pelaksanaan antigen rutin di kantor, penanganan untuk karyawan yang positif, penanganan untuk karyawan yang kontak erat.

Dalam selama berlangsungnya Pandemi Covid-19 ini PT Geoservices mampu konsisten menentukan kebijakannya untuk mempertahankan karyawan sehingga tidak ada pengurangan karyawan, serta hak karyawan tidak ada yang berubah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif yaitu penelitian ilmiah sistematis yang berurusan dengan bagian- bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan- hubungannya yang datanya berupa angka. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematika, teori dan atau hipotesis terkait fenomena. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.\

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas Variabel X dan Y

Variabel	Item	Nilai Person Correlation	Nilai r Tabel	Keterangan
Transparansi	X1	0,727	0,304	Valid
	X2	0,837	0,304	Valid
	X3	0,844	0,304	Valid
	X4	0,73	0,304	Valid
	X5	0,565	0,304	Valid
	X6	0,724	0,304	Valid
Implementasi Kebijakan Perusahaan	Y1	0,665	0,304	Valid
	Y2	0,715	0,304	Valid
	Y3	0,328	0,304	Valid
	Y4	0,674	0,304	Valid
	Y5	0,734	0,304	Valid

Dari tabel menyatakan bahwa hasil uji validitas yang dilakukan pada 42 responden dinyatakan valid. Hasil validitas yang telah dilakukan diketahui bahwa seluruh data pada penelitian ini dinyatakan valid karena nilai r hitung > r table

Uji Reliabilitas

Tabel Uji Reliability Variabel X dan Y

Uji Reliability Variabel X

Uji Reliability Variabel Y

Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of item	Cronbach's Alpha	N of item
0,829	6	0,611	5

Dari table diatas menyatakan bahwa hasil uji coba dari 42 responden menunjukkan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* pada variable Transparansi (X) Terhadap Implementasi Kebijakan Perusahaan (Y) di atas nilai 0,6.

Uji Normalitas

Tabel Uji Normalitas Kolomogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.12434526
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.085
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel diatas berikut diketahui nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.848 ^a	.718	.711	1.13831	1.600

- a. Predictors: (Constant), Transparansi
- b. Dependent Variable: Implementasi

Dari tabel diatas hasil uji Autokorelasi sebagai berikut :
N = 42 (Total Responden)

$$d = 1,600 \text{ (Durbin-Watson)}$$

$$dL = 1,456$$

$$dU = 1,553$$

$$4 - dL = 4 - 1,456 = 2,544$$

$$4 - dU = 4 - 1,553 = 2,447$$

$$\text{Hasil} = dU < d < 4 - dU$$

$$= 1,553 < 1,600 < 2,447$$

Kesimpulan dari hasil Uji Autokorelasi tersebut adalah tidak terdapat Autokorelasi pada variabel Transparansi (X) terhadap Implementasi kebijakan Perusahaan (Y).

Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel Uji Regresi Linier Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.328	1.463		5.008	.000
	Transparansi	.558	.055	.848	10.100	.000

a. Dependent Variable: Implementasi

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa t hitung = 5,008 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh antara variable Transparansi (X) terhadap variabel Implementasi Kebijakan Perusahaan (Y).

Uji Koefisien Korelasi

Tabel 4. 1 Uji Koefisien Korelasi

		Transparansi	Implementasi
Transparansi	Pearson Correlation	1	.848**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	42	42
Implementasi	Pearson Correlation	.848**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan pada tabel diatas nilai pearson correlation 0,848 atau mendapatkan nilai kualifikasi koefisien korelasi 0,71 – 0,90 dengan kualifikasi tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel Transparansi (X) terhadap Implementasi Kebijakan Perusahaan (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.848 ^a	.718	.711	1.13831

a. Predictors: (Constant), Transparansi

Berdasarkan pada tabel Model Summary tersebut di hasilkan bahwa nilai R (Koefisien Korelasi) sebesar 0,848 yang berarti hubungannya adalah positif, Nilai R Square (Koefisien Determinasi) di peroleh sebesar 0,718 yang berarti bahwa variabel Transparansi (X) dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perusahaan (Y). Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 KD &= Rr^2 \times 100\% \\
 &= 0,848^2 \times 100\% \\
 &= 0,718 \times 100\% = 71,8\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil tersebut dapat di katakan bahwa variabel Transparansi (X) mempunyai pengaruh sebesar 71,8% terhadap Implementasi Kebijakan Perusahaan (Y) dan sisanya 28,2% di pengaruhi oleh faktor lainnya.

Kesimpulannya adalah variabel Transparansi terhadap Implementasi Kebijakan Perusahaan memiliki korelasi derajat hubungan yaitu korelasinya memiliki hubungan yang tinggi, dengan interval 0,71-0,90.

Uji t

Tabel Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.328	1.463		5.008	.000
	Transparansi	.558	.055	.848	10.100	.000

a. Dependent Variable: Implementasi

Berdasarkan tabel di atas di peroleh nilai t hitung $5,008 > t$ tabel $1,681$ dengan sig. $0,000 < 0,05$ maka H_0 di tolak H_a diterima, artinya Transparansi (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Implementasi kebijakan Perusahaan (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Transparansi Terhadap Implementasi Kebijakan Perusahaan, maka hasilnya dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisa regresi linier di dapat nilai persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

$$Y = 8,432 + 0,620$$

Konstanta sebesar $9,052$, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja karyawan adalah sebesar $9,052$.

2. Koefisien regresi X sebesar $0,620$ yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Transparansi, maka nilai Implementasi Kebijakan Perusahaan akan bertambah sebesar $0,620$ koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat di katakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.
3. Nilai R square (koefisien Determinasi) di peroleh sebesar $64,0\%$ yang berarti pengaruh variabel Transparansi (X) terhadap Implementasi Kebijakan Perusahaan (Y) sebesar $64,0\%$.
4. Berdasarkan hasil uji t, dari hasil penelitian ini menghasilkan di peroleh nilai t hitung $5,204 > t$ tabel $1,681$ dengan sig. $0,000 < 0,05$ maka H_0 di tolak H_a diterima.

Artinya Transparansi (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Kebijakan Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126.

Nurhayati, Eka. 2017. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja, Dan Pengetahuan Akuntansi Syariah

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Tahir Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta

Abraham H. Maslow. 2013. *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. PT. PBP, Jakarta

Bahri, Syamsul, Fahry Zamzam. 2014. *Model Penelitian Kuantitatif. Berbasis SEM-AMOS*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing. Hal 1.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Narimawati, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian : Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Jakarta : Genesis.

Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali

Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.